



## **Pendahuluan**

Air adalah sumber kehidupan fundamental yang mendasari keberlanjutan ekosistem dan peradaban manusia, namun dalam realitas kontemporer, hak atas air sering kali tereduksi oleh ambisi pertumbuhan ekonomi yang eksploitatif (Bobby Banerjee et al., 2023). Di Indonesia, narasi sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam acap kali berujung pada paradoks berkelimpahan (*paradox of abundance*), di mana kekayaan alam yang melimpah justru berjalan beriringan dengan krisis ekologis yang kian memprihatinkan. Eksploitasi sumber daya alam, termasuk hutan, air, energi, dan pangan, sering kali dijalankan melalui pendekatan sektoral dan berorientasi jangka pendek yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Akibatnya, alih-alih menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, negara sering kali terjebak dalam kutukan sumber daya alam yang melanggengkan kemiskinan struktural dan memperparah kerentanan masyarakat lokal terhadap bencana alam dan krisis ekologis (Suwarno, 2025).

Dalam kerangka ekologi politik, krisis lingkungan seperti pencemaran air tidak dapat dipandang semata-mata

sebagai fenomena biofisik atau kegagalan teknis, melainkan sebagai manifestasi dari kegagalan sistemik dan ketimpangan relasi kuasa. Kerusakan lingkungan lahir dari interaksi kompleks antara dinamika sosial, ekonomi, kelembagaan, dan ekologi, di mana kebijakan publik acap kali disandera oleh dominasi kepentingan oligarki. Tata kelola sumber daya alam yang berpihak pada akumulasi modal korporasi raksasa berpotensi menciptakan fenomena yang meminggirkan masyarakat adat dan lokal, di mana instrumen regulasi negara tanpa disadari justru memfasilitasi eksploitasi dan melegitimasi perampasan ruang hidup rakyat. Dalam konteks ini, kelompok masyarakat rentan seperti petani dipaksa menanggung beban eksternalitas negatif dari industrialisasi ekstraktif, sementara keuntungan finansial yang besar mengalir menjauhi lokus masyarakat terdampak.

Kabupaten Bojonegoro merupakan episentrum yang merepresentasikan secara nyata benturan antara kepentingan ketahanan pangan lokal dan hegemoni industri ekstraktif skala nasional. Sebagai salah satu lumbung pangan strategis di Jawa Timur yang sangat bergantung pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo dan ketersediaan cadangan air

tanah, wilayah ini sekaligus menjadi basis operasi industri minyak dan gas (migas) raksasa seperti Blok Cepu (Grigg, 2024). Pertemuan dua sektor yang kontradiktif ini melahirkan kerentanan tingkat tinggi dalam keterhubungan (nexus) antara air, pangan, dan energi. Ketika industri ekstraktif berekspansi secara masif, fungsi hidrologis lanskap menjadi terganggu, yang pada gilirannya secara langsung mengancam produktivitas pertanian dan memicu krisis air bersih bagi komunitas agraris yang bermukim di sekitarnya.

Karakteristik industri migas, baik di sektor hulu eksplorasi maupun hilir pengolahan, membawa risiko inheren yang luar biasa tinggi terhadap kerusakan lingkungan hidup dan struktur sosial masyarakat setempat. Rangkaian aktivitas industri padat modal ini secara terus-menerus mengekstraksi sumber daya alam yang tak terbarukan dan membutuhkan pembukaan lahan yang luas. Potensi pencemaran dari kegiatan industri ini sangat masif, mencakup polusi udara, peningkatan suhu, kebisingan, hingga pencemaran air dan tanah akibat pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah cair industri yang tidak tertangani dengan teknologi remediasi yang paripurna dapat merembes secara

destruktif ke badan sungai dan akuifer, melampaui ambang baku mutu lingkungan, serta mengancam keberlangsungan ekosistem hayati di wilayah operasional.

Pencemaran sumber-sumber air tanah dan aliran sungai akibat rembesan limbah industri ekstraktif mendatangkan efek ganda yang merusak bagi kelompok petani lokal di Bojonegoro, yang secara perlahan berujung pada marginalisasi sosial-ekonomi yang sistemik. Petani yang secara absolut menggantungkan keberlangsungan irigasi sawah mereka pada sumber air yang kini terkontaminasi, harus menghadapi kenyataan pahit berupa penurunan drastis dalam kualitas dan kuantitas panen. Kondisi krisis ini memaksa mereka mengeluarkan biaya ekstra yang sangat membebani untuk mencari sumber pasokan air alternatif atau sekadar mencoba memulihkan kesuburan tanah yang telah teracuni. Dalam skala yang lebih luas, defisit kuantitas dan kualitas air bersih ini merupakan ironi tragis dari sebuah negara yang diguyur curah hujan tinggi, namun gagal merawat serta melestarikan daya tampung airnya (Walter, 2014).

Dominasi dan hegemoni industri ekstraktif tidak melulu ditegakkan melalui penguasaan modal dan alat-alat

produksi fisik, tetapi juga dirawat lewat penguasaan narasi sosial dan kebijakan, salah satunya menggunakan instrumen program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Dalam berbagai temuan di lapangan, implementasi CSR sering kali kehilangan roh pemberdayaan yang sesungguhnya dan gagal membuktikan diri berkontribusi pada kemandirian kesejahteraan sosial masyarakat lingkaran tambang. Alih-alih menyelesaikan akar permasalahan ekologis yang ditimbulkannya, program filantropi dan santunan semacam ini lebih sering didesain sebagai instrumen "peredam" konflik sosial untuk melunakkan resistensi dan protes warga terdampak (Huber, 2017). Kondisi ini menempatkan masyarakat pada posisi ketergantungan yang akut terhadap uluran tangan korporasi, sehingga secara perlahan membunuh daya kritis mereka terhadap realitas pencemaran air di desa mereka.

Ironisnya, instrumen regulasi negara yang sejatinya dirancang untuk memberikan perlindungan ekologis pada praktiknya sering kali lumpuh saat dihadapkan pada mesin pertumbuhan investasi industri ekstraktif skala raksasa. Kebijakan publik yang masih bersifat sentralistik, terfragmentasi

dalam ego sektoral, serta abai terhadap prinsip daya dukung lingkungan sukses menciptakan sebuah "lingkaran setan" krisis ekologis. Tata kelola yang dijalankan secara tidak adil, minim partisipasi bermakna, dan didorong oleh relasi kuasa yang timpang ini gagal memberikan benteng perlindungan hak asasi bagi masyarakat rentan. Ketika pencemaran air tanah terjadi akibat kelalaian operasional industri, ketegasan penegakan hukum lingkungan sering kali dikompromikan dengan alasan menjaga iklim investasi dan target sumbangan devisa, meninggalkan masyarakat memikul sendiri penderitaan ekologisnya (Giraldo, 2019).

Benturan diametral antara keberadaan masyarakat agraris pedesaan dan ekspansi kapital industri padat modal lantas memproduksi kesenjangan sosial-ekonomi yang tajam dan kasat mata di tingkat tapak. Komunitas industri yang terdiri dari kaum terpelajar dan pekerja profesional menikmati standar hidup eksklusif beserta infrastruktur penunjang yang mewah, sementara di sisi lain, masyarakat lokal yang menjadi "tuan rumah" tetap terbelenggu dalam kondisi terbelakang dan minim fasilitas. Ketimpangan vertikal ini, diperparah oleh hilangnya fungsi-fungsi lingkungan



penelitian yang signifikan dalam literatur yang ada saat ini. Mayoritas studi terdahulu mengenai tata kelola industri migas di Kabupaten Bojonegoro cenderung terjebak pada analisis yang berpusat pada dinamika ekonomi-politik Dana Bagi Hasil (DBH), efektivitas distribusi Corporate Social Responsibility (CSR), maupun konflik pembebasan lahan (agraria terestrial). Sangat sedikit penelitian yang meletakkan air (hidropolitik) sebagai episentrum analisis, padahal kelangkaan dan degradasi kualitas air merupakan ancaman paling mematikan bagi eksistensi masyarakat agraris di hilir operasi migas.

Kebaruan (novelty) utama dari penelitian ini terletak pada pergeseran paradigma analisis; dari yang sebelumnya memandang pencemaran air semata-mata sebagai kecelakaan teknis atau kegagalan baku mutu lingkungan (pendekatan teknosentris), menjadi sebuah fenomena ekologi politik. Penelitian ini membedah pencemaran air sebagai sebuah 'kompromi politik' yang dilembagakan, di mana instrumen regulasi dan pengawasan negara secara sistematis ditumpulkan demi memuluskan akumulasi kapital industri ekstraktif. Dengan mengintegrasikan kerangka kutukan sumber daya alam

(resource curse) dan ekologi politik, studi ini membongkar bagaimana hegemoni narasi pembangunan energi bekerja secara senyap untuk menormalisasi marginalisasi petani lokal.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menawarkan kebaruan empiris dengan memetakan bentuk-bentuk resistensi dan adaptasi petani di sekitar wilayah operasi migas Bojonegoro, yang memiliki karakteristik berbeda dengan perlawanan agraris pada industri tambang padat (Budds, 2004). Melalui investigasi kritis ini, artikel ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur ekologi politik di kawasan lumbung energi Indonesia, tetapi juga mendesak lahirnya mekanisme pengaman lintas sektor (nexus safeguard mechanism) yang meletakkan hak atas air di atas kepentingan ekstraksi energi.

### **Tinjauan Pustaka**

Kajian mengenai krisis lingkungan dan degradasi sumber daya alam dewasa ini telah mengalami pergeseran paradigma yang fundamental, bergerak dari pendekatan teknosentris menuju analisis ekologi politik yang lebih kritis dan multidimensional. Pendekatan ekologi politik menolak pandangan tradisional yang mengasumsikan bahwa kerusakan lingkungan—seperti pencemaran air—hanyalah sekadar



kerap kali mengalami degradasi fungsi, dari yang seharusnya menjadi benteng perlindungan ekologis, menyusut menjadi sekadar formalitas administratif untuk melegitimasi operasi korporasi. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan target investasi menciptakan hegemoni struktural yang mengunci otonomi pembuat kebijakan (Thommandru et al., 2025). Akibatnya, terjadi pengabaian sistematis terhadap pelanggaran baku mutu lingkungan. Negara, yang sejatinya memiliki mandat konstitusional untuk menjamin hak atas lingkungan yang bersih, sering kali memposisikan diri sebagai fasilitator bagi akumulasi kapital industri, sehingga pencemaran limbah B3 ke badan-badan sungai direduksi maknanya menjadi sekadar "biaya pembangunan" yang wajar dan harus diterima begitu saja oleh publik.

Dampak langsung dari kompromi kebijakan dan hegemoni industri ekstraktif tersebut adalah termarginalisasinya kelompok masyarakat agraris, yang dalam literatur sosiologi pedesaan digambarkan sebagai proses pemiskinan yang terstruktur (structural impoverishment). Petani merupakan kelas sosial yang paling rentan terhadap guncangan hidrologis,

karena ruang subsistensi dan moda produksi mereka memiliki ketergantungan absolut pada ketersediaan air yang berkualitas. Ketika aliran sungai dan akuifer tanah terkontaminasi oleh senyawa kimia industri, petani tidak hanya mengalami kerugian berupa gagal panen atau matinya kesuburan tanah, tetapi juga mengalami devaluasi atas profesi dan kedaulatan mereka. Literatur menunjukkan bahwa marginalisasi ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses pelemahan daya tahan ekonomi secara perlahan; mulai dari membengkaknya biaya produksi untuk menetralkan racun di sawah, keharusan membeli air bersih untuk kebutuhan domestik, hingga pada akhirnya memaksa mereka melepas kepemilikan lahan dan beralih profesi menjadi buruh kasar yang termarjinalkan di tanah kelahirannya sendiri (Adger et al., 2001).

Untuk melanggengkan operasi dan meredam potensi gejolak sosial dari masyarakat yang termarjinalkan, korporasi ekstraktif umumnya mengerahkan instrumen hegemoni kultural dan sosial, salah satunya melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Berbagai tinjauan pustaka kritis membongkar mitos bahwa

CSR adalah wujud kedermawanan atau etika bisnis murni. Dalam perspektif ekologi politik, kucuran dana filantropi, pembangunan balai desa, hingga pembagian sembako sering kali difungsikan sebagai strategi greenwashing dan mekanisme kontrol sosial (pemberangusan perlawanan secara halus). CSR didesain untuk menciptakan ilusi harmoni dan membangun relasi ketergantungan yang akut antara warga dengan perusahaan, sehingga masyarakat kehilangan daya kritisnya untuk menuntut keadilan substansial atas air mereka yang tercemar. Dengan kata lain, CSR bekerja sebagai "obat bius" yang menutupi akar kejahatan ekologis, meredam artikulasi protes warga, dan memastikan bahwa proses pengerukan sumber daya alam dapat terus berlangsung tanpa hambatan politik dari akar rumput.

Kendati berada di bawah tekanan hegemoni yang sistematis, literatur mengenai gerakan sosial lingkungan mencatat bahwa kelas agraris tidak selalu pasrah menerima nasib sebagai korban pasif. Resistensi masyarakat lokal kerap meletus sebagai antitesis terhadap narasi pembangunan ekstraktif, yang sering kali digerakkan oleh memori kolektif dan kearifan ekologis kultural mereka. Studi-studi terdahulu—seperti

perlawanan heroik komunitas perempuan Samin di Pegunungan Kendeng melawan industri semen—memberikan pijakan literatur yang kuat mengenai bagaimana perlawanan akar rumput dikonstruksi. Dalam kasus-kasus tersebut, alam dan air tidak dipandang melalui kacamata komodifikasi kapitalis, melainkan dihayati sebagai wujud "Ibu Bumi" yang suci dan penopang kehidupan yang harus dibela. Epistemologi perlawanan yang bernuansa ekofeminisme dan teologi pembebasan lingkungan ini membuktikan bahwa bagi masyarakat agraris, mempertahankan kedaulatan atas mata air dan sungai adalah sebuah perjuangan mempertahankan eksistensi dan martabat manusia, sebuah spirit yang terus beresonansi dalam berbagai konflik agraria dan air di lingkaran industri ekstraktif modern.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrumental (instrumental case study), yang berpijak secara epistemologis pada paradigma kritis. Pemilihan pendekatan kualitatif dianggap paling representatif karena rumusan masalah dalam kajian ekologi politik menuntut eksplorasi mendalam mengenai relasi kuasa, makna yang

dikonstruksi, serta pengalaman empiris subjek penelitian yang tidak dapat sekadar dikuantifikasi menggunakan rasio angka. Paradigma kritis di sini difungsikan sebagai pisau analisis utama untuk membongkar hegemoni, ketimpangan struktural, dan praktik kompromi kebijakan yang tersembunyi di balik fenomena pencemaran air oleh industri ekstraktif. Melalui metode studi kasus, penelitian ini memusatkan penyelidikannya pada lokus spesifik guna memperoleh pemahaman yang utuh (holistik) dan kontekstual mengenai bagaimana mesin kapitalisme industri minyak dan gas bumi beroperasi secara faktual dalam memarjinalkan kelas agraris, serta bagaimana mekanisme resistensi kultural maupun struktural dibangun oleh komunitas petani di tingkat tapak.

Lokus penelitian ini difokuskan di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, khususnya di desa-desa yang masuk dalam kategori "Ring 1" area operasi industri migas (seperti kawasan Blok Cepu) dan hamparan lahan pertanian yang sangat bergantung pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo beserta anak-anak sungainya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristiknya yang paradoksikal, yakni sebagai lumbung energi nasional

sekaligus lumbung pangan daerah, sehingga menjadikannya arena kontestasi hidropolitik yang sangat ideal dan kritis untuk diteliti. Untuk menggali data yang komprehensif, penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling yang dilanjutkan dengan snowball sampling guna menemukan aktor-aktor kunci di lapangan. Informan dalam penelitian ini dipetakan secara proporsional berdasarkan hierarki relasi kuasa, yang meliputi kelompok masyarakat rentan (petani padi, pengurus Himpunan Petani Pemakai Air/HIPPA), representasi aparatur negara (Dinas Lingkungan Hidup, perangkat desa terkait), perwakilan entitas kapital (pihak Hubungan Masyarakat atau CSR perusahaan ekstraktif), serta aktor penyeimbang dari kalangan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang secara persisten mengadvokasi isu agraria dan tata kelola air.

Proses pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui triangulasi teknik yang mencakup wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatoris, dan penelusuran dokumen (studi dokumentasi). Wawancara mendalam semistruktur dilakukan secara dialogis untuk menangkap narasi dan lived



analitis yang saling mengunci. Kajian diawali dengan membongkar anatomi pencemaran fisik dan menelusuri akar kelembagaannya sebagai wujud nyata dari kerapuhan tata kelola ekologis. Analisis kemudian dilanjutkan dengan membedah operasi mesin hegemoni korporasi—khususnya melalui instrumen CSR dan narasi elitis—dalam menormalisasi kerusakan dan meredam artikulasi konflik warga. Kajian selanjutnya menukik pada eksekusi paling destruktif dari hegemoni tersebut, yakni marginalisasi sistemik yang melumpuhkan kedaulatan ekonomi dan pangan kelas agraris. Sebagai penutup dialektika, bab ini memetakan embrio resistensi hidropolitik di tingkat akar rumput, merekam bagaimana komunitas petani lokal membangun perlawanan kultural dan struktural guna merebut kembali keadilan atas ruang hidup dan mata air mereka.

### **Anatomi Pencemaran dan Kerapuhan Tata Kelola Ekologis di Kawasan Migas**

Eksplorasi dan eksploitasi industri minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro, khususnya yang terkonsentrasi di wilayah Ring 1, telah memicu disrupsi hidrologis berskala masif. Kawasan yang berbatasan langsung dengan fasilitas pengolahan

utama ini menanggung beban ekologis terberat akibat intensitas ekstraksi yang tinggi (Bryant, 1998). Pembukaan lahan secara luas dan pengeboran secara terus-menerus secara radikal mengubah bentang alam, merusak daerah resapan, dan mengganggu siklus hidrologi alami yang telah lama menopang kehidupan masyarakat pedesaan. Hal ini dikonfirmasi oleh penuturan Mbah Karyo (nama samaran), seorang petani di Ring 1, yang menyatakan, "Sejak ada proyek urukan tanah dan pengeboran itu, sumber air di sumur kami langsung menyusut drastis dan warnanya jadi keruh kecoklatan." Pernyataan ini mengindikasikan adanya perampasan ruang ekologis (ecological dispossession) di mana infrastruktur ekstraktif secara langsung mematikan infrastruktur subsisten warga. Analisis spasial di lapangan juga memperlihatkan bahwa radius zona penyangga (buffer zone) antara dinding fasilitas migas dengan sawah warga terlampau sempit. Kondisi ini menempatkan masyarakat agraris pada garis depan kerentanan tanpa adanya mitigasi hidrologis yang memadai dari pihak perusahaan.

Hasil penelusuran lapangan dan analisis mendalam terhadap berbagai dokumen lingkungan menunjukkan sebuah realitas yang mengkhawatirkan:

pencemaran air di kawasan tersebut bukanlah insiden kecelakaan teknis yang bersifat sporadis. Sebaliknya, hal ini merupakan eksekusi sistemik dari sebuah proses produksi padat modal. Logika ekstraktivisme industri migas beroperasi dengan memprioritaskan maksimalisasi target produksi dan keuntungan, sementara daya dukung ekosistem seolah ditempatkan sebagai variabel minor yang bisa diabaikan dalam kalkulasi industri. Seorang aktivis lingkungan lokal dari Bojonegoro Institute menegaskan fenomena ini dalam wawancaranya, "Perusahaan sering kali berdalih sudah sesuai SOP, tetapi desain instalasi pengolahan limbah mereka jelas dibuat dengan kapasitas minimal demi menekan biaya operasional (cost recovery)." Temuan ini mempertegas tesis bahwa dalam logika kapitalisme ekstraktif, kelestarian alam direduksi menjadi sekadar beban pengeluaran yang harus diminimalisir. Praktik ini membuktikan bahwa kerusakan lingkungan bukan diakibatkan oleh ketidaktahuan teknologi, melainkan sebuah pilihan rasional-ekonomis dari korporasi untuk memaksimalkan akumulasi keuntungan. Akibatnya, risiko kerusakan secara sadar ditransfer dari neraca keuangan perusahaan menjadi

beban penderitaan yang harus dipikul oleh komunitas lokal.

Dampak paling nyata dari pengabaian daya dukung lingkungan tersebut termanifestasi pada kualitas sumber daya air lokal. Limbah cair sisa operasi industri, yang teridentifikasi membawa residu Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terbukti tidak tertangani dengan sistem remediasi yang kedap sepenuhnya (Geng, 2026). Residu beracun ini secara perlahan merembes ke dalam akuifer air tanah, mengontaminasi sumur-sumur warga, dan bermuara di anak-anak Sungai Bengawan Solo yang selama ini menjadi urat nadi utama sistem irigasi pertanian di Bojonegoro. "Kalau pas musim kemarau dan air sungai surut, bau dari aliran pembuangan itu menyengat sekali seperti bau belerang campur minyak, dan kalau dipakai menyiram, daun padi langsung menguning dan keriting," keluh Pak Supardi, salah satu pengurus Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) setempat. Narasi empiris ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa telah terjadi degradasi kualitas air secara kimiawi yang dampaknya melampaui kemampuan asimilasi alam. Analisis terhadap sampel air di titik keluaran (outfall) yang bermuara ke sungai mengindikasikan kegagalan sistem

remediasi dalam menetralsir polutan beracun secara paripurna. Secara ekologi politik, pembiaran pembuangan limbah beracun ini adalah bentuk kekerasan lingkungan (environmental violence) yang secara diam-diam membunuh kedaulatan agraria para petani.

Fenomena peracunan ruang air ini secara empiris mengonfirmasi betapa rapuhnya nexus (keterhubungan) antara energi, air, dan pangan di wilayah tersebut. Kabupaten Bojonegoro terjebak dalam paradoks perannya sebagai lumbung energi nasional sekaligus lumbung pangan daerah. Dalam praktiknya, ambisi negara untuk memacu produksi energi migas secara agresif telah secara langsung mengkanibal ketersediaan pasokan air bersih, yang sejatinya merupakan prasyarat mutlak bagi keberlangsungan ketahanan pangan komunitas agraris di sekitarnya. Paradoks ini direkam dengan tajam melalui keluhan seorang perangkat desa di Kecamatan Gayam, "Pemerintah pusat terus menggenjot kami untuk panen padi tiga kali setahun demi swasembada, tapi di sisi lain membiarkan sumber air kami dirusak oleh aktivitas tambang minyak." Wawancara ini menyingkap inkonsistensi fatal dalam kebijakan tata ruang dan pembangunan nasional yang saling tumpang tindih serta meniadakan

satu sama lain. Analisis nexus menunjukkan bahwa ekstraktivisme migas telah membajak hak guna air yang seharusnya dialokasikan untuk menjamin ketahanan pangan kolektif. Transformasi paksa dari lumbung pangan menjadi kawasan industri ini pada akhirnya menciptakan kerawanan pangan laten yang ironisnya justru terjadi di daerah penghasil energi terbesar.

Membaca fenomena ini melalui kacamata ekologi politik, degradasi kualitas air yang terjadi tidak bisa hanya dipandang sebagai kegagalan infrastruktur pengelolaan limbah semata. Kondisi ini merupakan manifestasi langsung dari kegagalan tata kelola (governance failure) yang secara diam-diam dilembagakan oleh sistem (Watts & Peet, 2004). Krisis ekologis di lingkaran tambang ini adalah cerminan dari kebijakan publik yang bias kepentingan, di mana pengelolaan sumber daya alam lebih memfasilitasi akumulasi modal korporasi ketimbang menjamin hak atas lingkungan yang sehat bagi warga negara. Seorang mantan aparatur Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro secara blak-blakan mengakui, "Kami di daerah sering kali berada dalam posisi dilematis dan tidak berdaya untuk memberi sanksi tegas,



negara tampak lebih memprioritaskan penjagaan "iklim investasi" dan pencapaian target lifting migas nasional dibandingkan dengan penegakan hukum lingkungan yang berkeadilan. Akibatnya, ambang batas baku mutu air sering kali dinegosiasikan secara sepihak di ruang-ruang birokrasi, membiarkan eksternalitas negatif berupa limbah industri mengalir bebas dan secara paksa menumpuk di ruang hidup masyarakat agraris yang semakin termarginalkan. Puncak ketidakadilan ini dirangkum dengan getir oleh seorang petani sepuh di pinggiran Bengawan Solo, "Perusahaan minyak itu ibarat tamu raksasa di rumah kami; mereka yang bikin kotor sembarangan, tapi kami yang disuruh membersihkan dan menelan racunnya setiap hari." Kutipan ini merepresentasikan kesadaran kelas dari kaum agraris yang menyadari sepenuhnya posisi inferior mereka dalam konstelasi kuasa ekonomi-politik eksploitatif tersebut. Analisis kritis menyimpulkan bahwa kompromi baku mutu air dan lemahnya sanksi bukanlah sebuah kelalaian, melainkan sebuah subsidi terselubung (hidden subsidy) yang dipaksakan dari alam dan petani miskin kepada korporasi raksasa bernilai triliunan rupiah. Pada akhirnya, hegemoni industri ekstraktif di

Bojonegoro sukses memprivatisasi keuntungan finansial ke pusat-pusat kekuasaan, sembari mensosialisasikan kerugian ekologisnya kepada kelompok masyarakat lokal yang paling rentan secara struktural.

### **Hegemoni Narasi Pembangunan dan CSR sebagai Instrumen "Peredam" Konflik**

Untuk menormalisasi operasi ekstraktif yang secara faktual merusak lanskap hidrologis di Bojonegoro, entitas korporasi bersama elit birokrasi lokal secara aktif mereproduksi narasi hegemoni pembangunan (Watts, 2017). Kehadiran industri migas skala raksasa ini terus-menerus dibingkai secara megah sebagai "berkah ekonomi" yang akan membawa modernisasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retorika pembangunan ini sengaja dikonstruksi dan diamplifikasi secara masif melalui berbagai saluran komunikasi publik dan kebijakan untuk menutupi realitas penderitaan ekologis warga di tingkat tapak. Hegemoni wacana ini direkam dengan jelas melalui penuturan seorang aktivis LSM lokal yang menyatakan, "Pemerintah dan perusahaan selalu menggembar-gemborkan Bojonegoro sebagai lumbung energi yang sukses, tapi mereka buta pada petani yang sawahnya



sumber daya air lokal yang menjadi tumpuan subsistensi harian telah dirampas atau dicemari polutan industri, masyarakat justru dikondisikan untuk merasa berutang budi atas kompensasi-kompensasi artifisial yang disalurkan oleh pihak perusahaan. Dampak psikologis dari ketergantungan ini tercermin dari kepasrahan Ibu Siti, seorang buruh tani, yang berujar, "Mau protes air sumur menghitam juga kami takut, wong tiap bulan puasa kita dikasih jatah sembako dan suami kadang kerja serabutan di proyek mereka." Kutipan ini merepresentasikan hilangnya kemerdekaan dan kedaulatan warga yang kini tersandera oleh jaring-jaring filantropi korporasi yang pragmatis. Kedermawanan perusahaan pada hakikatnya bertransformasi menjadi instrumen penundukan kelas (class subordination), memastikan masyarakat miskin tetap terpuruk pada posisi inferior. Mekanisme psiko-sosial ini secara efektif mengkooptasi kemarahan komunal, mencegah kelas agraris untuk merumuskan gugatan ekologis yang terorganisir terhadap entitas industri.

Kondisi psikologis dan struktural yang dibentuk melalui intervensi karitatif tersebut pada akhirnya melahirkan sebuah relasi patron-klien yang sangat asimetris. Dalam ekosistem

sosial yang baru ini, korporasi memposisikan dirinya sebagai patron agung yang seolah-olah menjadi pahlawan ekonomi desa, sementara warga sipil dipaksa menjadi klien yang harus selalu patuh dan berterima kasih. Dominasi kultural ini menciptakan iklim ketakutan tanpa represi fisik, di mana keluhan esensial mengenai air irigasi yang menghitam, bau menyengat dari sumur domestik, atau siklus gagal panen beruntun menjadi hal yang sangat tabu untuk disuarakan secara terbuka di balai desa. Iklim pembungkaman ini dikonfirmasi oleh seorang tokoh agama setempat yang menceritakan, "Dulu kalau ada limbah cemari sungai, warga pasti kumpul demo ke lapangan, tapi sekarang pada diam karena sungkan atau takut jatah bantuan desanya disetop." Fakta empiris ini membuktikan bahwa CSR tidak hanya gagal memberdayakan kemandirian warga, tetapi juga secara aktif mencerabut akar keberanian komunal dan solidaritas organik yang dulunya menjadi kekuatan utama desa. Melalui skema patronase yang opresif ini, tuntutan hak asasi atas lingkungan yang sehat berhasil dibungkam dan ditukar dengan kepatuhan sosial yang artifisial. Dominasi kultural semacam ini memastikan bahwa setiap letupan protes terkait kerusakan tata kelola air dapat



drastis dari musim ke musim. Petani padi dan palawija di desa-desa terdampak dihadapkan pada realitas ekologis di mana tanah mereka semakin mengeras dan tanaman gagal tumbuh optimal, memaksa mereka merombak total struktur pertanian subsisten yang telah diwariskan turun-temurun. Hal ini ditegaskan oleh Mbah Darmo, seorang petani sepuh, yang mengeluhkan, "Sejak air sungai sering hitam dan bau, padi saya banyak yang gabug (kosong) dan panen anjlok sampai separuhnya." Keluhan ini merupakan bukti empiris yang menyingkap tabir gelap ekstraktivisme, di mana akumulasi kekayaan migas berbanding lurus dengan penyusutan daya dukung pangan lokal. Secara analitis, fenomena ini memperlihatkan terjadinya perampasan nilai lebih (surplus value) ekologis, di mana korporasi meraup untung dengan cara merusak faktor produksi paling esensial milik petani. Kutukan sumber daya alam pada titik ini tidak lagi sekadar teori, melainkan realitas pemiskinan yang direproduksi secara harian melalui peracunan ruang hidup warga.

Proses pemiskinan struktural ini beroperasi secara senyap melalui mekanisme pembengkakan biaya eksternal (external cost) yang secara sepihak dibebankan kepada masyarakat

lokal. Ketika aliran sungai dan air tanah tak lagi aman digunakan, petani terpaksa harus mengeluarkan modal ekstra yang mencekik hanya untuk memastikan tanaman mereka tetap hidup. Mereka kini harus menyewa mesin pompa air dengan durasi lebih lama untuk menarik air dari sumber yang lebih jauh, serta membeli lebih banyak pupuk kimia dan suplemen pertanian untuk mencoba menetralsir tanah yang telah teracuni residu limbah. Akumulasi beban finansial tambahan ini secara perlahan namun pasti menggerus ketahanan ekonomi rumah tangga petani yang sejak awal sudah berada dalam posisi subsisten. "Sekarang bertani itu seperti gali lubang tutup lubang; biaya beli solar untuk pompa air bersih saja sudah menghabiskan modal, belum lagi beli pupuk tambahannya," ungkap Pak Yanto, seorang petani penggarap. Pernyataan ini membongkar praktik kejahatan ekonomi-ekologis, di mana biaya pemulihan limbah yang seharusnya menjadi tanggung jawab korporasi justru ditransfer secara paksa menjadi beban operasional petani miskin. Analisis ekologi politik melihat hal ini sebagai sebuah mekanisme subsidi terselubung yang sangat eksploitatif, di mana kelas agraris mensubsidi kekayaan industri migas dengan darah dan keringat mereka



terpaksa beralih profesi menjadi buruh kasar harian, kuli bangunan, atau pekerja serabutan di proyek-proyek penyangga industri ekstraktif dengan upah yang tidak menentu dan tanpa jaminan perlindungan sosial yang memadai. "Sawah saya terpaksa dijual buat bayar utang pupuk, dan sekarang saya cuma jadi buruh gali pipa di perusahaan yang dulu merusak sawah saya itu," kisah Mas Supri dengan nada pasrah. Fenomena ini merupakan representasi sempurna dari konsep akumulasi melalui perampasan (*accumulation by dispossession*), di mana kapitalisme industri menciptakan krisis ekologis agar dapat mencaplok lahan warga dengan harga murah sekaligus mendapatkan tenaga kerja cadangan yang murah. Analisis struktural membuktikan bahwa lumbung migas ini tidak menciptakan lapangan kerja yang menyejahterakan, melainkan menjebak penduduk lokal dalam perbudakan modern bermotif industrialisasi. Transformasi paksa dari petani mandiri menjadi buruh upahan ini secara definitif mengukuhkan marginalisasi dan subordinasi kelas agraris di bawah dominasi kelas pemodal.

Dampak marjinalisasi ini tidak hanya merusak struktur ekonomi material, tetapi juga menghancurkan tatanan sosio-kultural dan psikologis

masyarakat setempat. Menjadi petani dalam budaya agraris Jawa, khususnya di wilayah Bojonegoro, bukan sekadar urusan mata pencaharian, melainkan identitas kultural dan kebanggaan sosiologis yang terikat erat dengan tanah serta air leluhur. Ketika tanah tersebut teracuni dan mereka terpaksa menjadi kuli di tanah kelahirannya sendiri, terjadi proses alienasi atau keterasingan yang mendalam terhadap ruang hidupnya. Masyarakat lokal kehilangan martabat (*dignity*) sebagai "tuan rumah" dan merasa dianaktirikan oleh negara yang lebih sibuk menggelar karpet merah bagi para investor raksasa. Kepahitan kultural ini terekam jelas dari ucapan seorang tokoh sesepuh desa, yang meratap, "Kita ini seperti numpang hidup di tanah tumpah darah sendiri, cuma bisa jadi penonton lihat orang luar kaya raya menyedot minyak kita." Ratapan ini menyingkap luka batin yang mendalam akibat penindasan berlapis; di mana mereka tidak hanya dimiskinkan secara ekonomi, tetapi juga diinjak martabatnya secara kultural oleh kekuatan ekstraktif yang arogan. Dalam kaca mata ekologi politik, hilangnya otonomi dan martabat ini adalah harga mahal yang dengan sengaja disembunyikan oleh negara di balik angka-angka statistik pertumbuhan ekonomi makro yang mengesankan. Pada



hidup dalam kosmologi agraris, menuntut kebersihan sungai dan mata air bukanlah sekadar tuntutan pemulihan aset ekonomi, melainkan perjuangan mempertahankan identitas, keyakinan spiritual, dan masa depan peradaban desa itu sendiri. Ketika korporasi mencoba meredam eskalasi konflik dengan menawarkan skema-skema kompensasi uang tunai atau pembangunan fasilitas desa yang bersifat kosmetik, tawaran tersebut mulai menemui kebuntuan di hadapan rasionalitas ekologis warga. Masyarakat menyadari bahwa uang ganti rugi sebesar apa pun tidak akan mampu membeli kembali kesuburan tanah yang telah mati akibat rembesan logam berat. "Bagi kami orang desa, merusak sumber air itu kwalat besar yang tidak bisa dibayar pakai uang ganti rugi miliaran sekalipun, karena ini urusan masa depan anak cucu kami," ujar Mbah Suro, sesepuh adat desa setempat dengan nada bergetar. Ungkapan spiritual ini menegaskan bahwa bagi komunitas agraris, air bukanlah sekadar komoditas material yang bisa dikuantifikasi secara moneter, melainkan entitas kultural yang sangat sakral. Benturan ontologis antara kacamata kapitalis yang memandang alam sebagai sumber daya ekstraksi dan kacamata petani yang memandangnya

sebagai sumber kehidupan inilah yang memicu radikalisme gerakan hidropolitik di tingkat tapak. Kesadaran kultural semacam ini membangun imunitas gerakan yang tangguh, membuat daya kritis warga kebal terhadap bujukan transaksional pragmatis yang menjadi senjata andalan instrumen CSR perusahaan.

Dalam upaya memperkuat daya dobrak terhadap hegemoni korporasi, komunitas petani yang mulanya berjuang secara sporadis kini mulai menemukan bentuk pengorganisasian ruang yang lebih taktis dan berjejaring. Mereka mengoptimalkan institusi-institusi lokal yang masih memiliki legitimasi sosial, seperti Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), sebagai kendaraan politik untuk mengkonsolidasikan tuntutan. Lebih jauh lagi, kesadaran akan keterbatasan akses terhadap data ilmiah mengenai baku mutu air mendorong kelompok tani ini untuk membangun aliansi strategis dengan jaringan aktivis lingkungan (LSM) dan akademisi progresif di luar lingkaran birokrasi daerah. Kolaborasi ini terbukti krusial dalam menerjemahkan keluhan empiris petani tentang "air berbau dan hitam" menjadi bahasa-bahasa saintifik dan hukum yang berdaya gedor di meja negosiasi. "Dulu kami cuma berani menggerutu pasrah di

sawah, tapi sekarang berkat jaringan HIPPA dan teman-teman LSM, kami berani bawa botol sampel air hitam ini untuk menggebrak meja di kantor bupati," cerita Mas Budi, seorang aktivis pemuda tani yang kian militan. Transformasi taktik dari perlawanan pasif menjadi konfrontasi diskursif secara terbuka ini menunjukkan adanya lonjakan kapasitas advokasi yang luar biasa di kalangan akar rumput. Aliansi strategis antara kekuatan empiris kaum tani dan kapasitas artikulasi politik masyarakat sipil sukses membongkar asimetri informasi lingkungan yang selama ini dipelihara secara apik oleh elit korporasi. Melalui pengorganisasian ruang yang solid dan berbasis bukti lapangan ini, kelas agraris berhasil membangun kontra-hegemoni untuk menelanjangi narasi manipulatif tentang "tambang ramah lingkungan" yang dipropagandakan oleh industri ekstraktif.

Dinamika perlawanan hidropolitik di lingkaran energi ini juga menyingkap fenomena sosiologis yang sangat penting, yakni tampilnya kaum perempuan pedesaan sebagai garda terdepan dalam eskalasi protes lingkungan. Layaknya resonansi dari gerakan heroik ibu-ibu Kendeng yang melawan pabrik semen, perempuan

petani di Bojonegoro menjadi kelompok yang merasakan pukulan paling telak dari peracunan tata air akibat pembagian peran reproduksi sosial mereka yang berat. Ketika air sungai membusuk dan sumur tercemar, perempuanlah yang harus memikul beban ganda; berjalan lebih jauh mencari air bersih untuk memasak, mencuci pakaian keluarga, memastikan kebersihan anak-anak, sekaligus memutar otak untuk menyalasi dapur yang terancam gagal panen. Beban domestik yang melipatganda secara ekstrem inilah yang memantik kemarahan yang sangat organik, mengubah kaum ibu yang secara stereotip dianggap pasif menjadi aktor perlawanan paling persisten yang tidak kenal kompromi saat berhadapan dengan aparat atau perwakilan perusahaan. "Kami ibu-ibu yang paling repot kalau air bau; mau masak, nyuci, dan mandiin anak susah semua, makanya kami sekarang nekat ikut turun blokir jalan menuntut sungai dibersihkan," ungkap Bu Warsini dengan raut wajah penuh amarah. Keterlibatan frontal perempuan pedesaan dalam front perlawanan ini menggemakan kembali spirit ekofeminisme yang menjadi antitesis paling mematikan bagi maskulinitas kapitalisme industri. Realitas ini membuktikan bahwa

kerusakan ekologis selalu bersifat bias gender, di mana perempuan yang tersudutkan ruang domestiknya akan bangkit menjadi entitas politik paling militan dalam mempertahankan daya dukung lingkungan keluarganya. Kehadiran dan tangisan kaum perempuan di garis depan demonstrasi memberikan bobot moral yang tak tertandingi, menelanjangi wajah brutal ekstraktivisme di mata publik secara luas.

Pada kulminasinya, manifestasi dari seluruh rangkaian kepahitan dan resistensi ini mengerucut pada satu tuntutan fundamental yang menghendaki perombakan sistemik, bukan lagi sekadar tambal sulam kompensasi filantropis. Gerakan hidropolitik akar rumput di Bojonegoro telah berevolusi dari sekadar memperjuangkan ganti rugi tanaman yang mati, menjadi gerakan politik ekologi yang menggugat arsitektur kebijakan energi nasional. Mereka menuntut negara untuk hadir secara nyata dan merumuskan mekanisme pengaman lintas sektor (nexus safeguard mechanism) yang meletakkan keselamatan air dan pangan di atas piramida prioritas pembangunan, melampaui kepentingan lifting migas. Desakan ini memaksa para elit politik lokal yang sebelumnya selalu berlindung

di balik narasi "kepentingan nasional" untuk menghadapi kenyataan bahwa krisis legitimasi sosial di tingkat tapak telah mencapai ambang kritis yang membahayakan stabilitas daerah. "Tuntutan kami sekarang cuma satu, pastikan air sungai dan sumur kami jernih kembali secara permanen, atau kalau perusahaan tidak sanggup, pabrik minyak itu yang harus ditutup!" tegas Pak Kades, yang karena tekanan massal warganya akhirnya berani membalik keberpihakan menentang korporasi. Ultimatum tanpa kompromi ini merepresentasikan puncak kematangan kesadaran kelas agraris bahwa solusi krisis lingkungan mutlak membutuhkan restrukturisasi tata kelola ruang hidup secara radikal. Gugatan berani ini pada esensinya adalah desakan mutlak dari bawah agar instrumen hukum negara berani memveto aktivitas operasi modal ekstraktif jika terbukti mengorbankan keberlanjutan ekosistem air. Melalui letupan-letupan hidropolitik inilah, masyarakat lumbung pangan mengirimkan deklarasi pamungkas bahwa kedaulatan atas air adalah hak asasi paling purba yang tidak dapat dibarter dengan mesin pertumbuhan ekonomi mana pun.

### **Kesimpulan**



cakrawala kajian ekologi politik di Indonesia. Pertama, diperlukan studi komparatif lintas sektor yang membandingkan anatomi konflik hidropolitik pada industri berbasis cair/gas (seperti migas) dengan industri ekstraktif padat (seperti tambang batu bara atau nikel), guna mengidentifikasi variasi strategi hegemoni korporasi dan ketahanan ekologis warga. Kedua, direkomendasikan adanya riset lanjutan yang menggunakan pendekatan metode campuran (mixed-methods) guna menghitung secara kuantitatif valuasi ekonomi dari kerugian eksternal (ecological debt) yang selama ini tidak terlihat dan ditanggung secara sepihak oleh rumah tangga petani akibat pencemaran air. Ketiga, dalam ranah kebijakan publik, sangat mendesak untuk dilakukannya riset terapan yang berfokus pada desain yuridis dan pelembagaan "mekanisme pengaman lintas sektor" (nexus safeguard mechanism), guna merumuskan instrumen hukum yang memiliki daya ikat untuk memveto operasi energi yang terbukti mengkanibal ketersediaan air bersih dan ketahanan pangan lokal.

#### **Daftar Pustaka**

Adger, W. N., Benjaminsen, T. A., Brown, K., & Svarstad, H. (2001). Advancing a political ecology of global

environmental discourses. *Development and Change*, 32(4), 681–715.

Anwar Sanusi, A. S. (2025). *Politik Ekologi dan Masa Depan Kebijakan Lingkungan di Indonesia*. PT Arr rad Pratama.

Bobby Banerjee, S., Maher, R., & Krämer, R. (2023). Resistance is fertile: Toward a political ecology of translocal resistance. *Organization*, 30(2), 264–287.

Bryant, R. L. (1998). Power, knowledge and political ecology in the third world: a review. *Progress in Physical Geography*, 22(1), 79–94.

Budds, J. (2004). Power, nature and neoliberalism: The political ecology of water in Chile. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 25(3), 322–342.

Cipta, H. (n.d.). *Kerusakan Ekologi Dalam Lintasan Jejak Kapital di Jantung Feodal*.

Famelasari, R., & Prastiwi, J. H. (2021). Kepemimpinan Perempuan dan Tata Kelola Tambang di Bojonegoro. *JIIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 126–147.

